

Peran Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Pengendalian Inflasi Dan Pengangguran

Nur Maulidah Apriliah Mahmudah Fauziah

Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul 'Ulum
Lamongan

Nurmaulidah.2022@mhs.unisda.ac.id

Abstract

Inflation and unemployment are interconnected economic issues that significantly impact societal welfare and the economic stability of a country. Monetary and fiscal policies are two main instruments used by governments and central banks to control inflation and reduce unemployment rates. Monetary policy, managed by the central bank, involves regulating interest rates and money supply to maintain price stability and encourage economic growth. Inflation control through monetary policy can help stabilize currency value and maintain purchasing power. On the other hand, fiscal policy, implemented by the government, includes regulating national spending and tax revenues to increase employment and stimulate economic activity. By increasing government spending, fiscal policy can boost aggregate demand, creating new job opportunities and reducing unemployment. While both policies play important roles, their effectiveness is influenced by various external factors and global economic conditions. This study aims to analyze the role of monetary and fiscal policies in controlling inflation and unemployment, and to evaluate the challenges in implementing these policies to achieve sustainable economic stability.

Keywords: monetary policy, fiscal policy, inflation, unemployment, economic stability, economic growth

Abstrak

Inflasi dan pengangguran merupakan masalah ekonomi yang saling berhubungan dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter dan fiskal adalah dua instrumen utama yang digunakan pemerintah dan bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan moneter, yang dijalankan oleh bank sentral, mencakup pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter dapat membantu menstabilkan nilai mata uang dan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pengaturan belanja negara dan penerimaan pajak untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta mendorong aktivitas ekonomi. Dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal dapat merangsang permintaan agregat sehingga menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Meskipun kedua kebijakan ini memiliki peran penting, efektivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan kondisi ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi dan pengangguran, serta mengevaluasi tantangan dalam implementasinya untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan moneter, kebijakan fiskal, inflasi, pengangguran, stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi

Pendahuluan

Stabilitas ekonomi merupakan tujuan utama bagi setiap negara. Salah satu indikator penting dari stabilitas ekonomi adalah tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan yang rendah. Inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat, sedangkan kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Untuk mencapai stabilitas perekonomian yang diinginkan, pemerintah memiliki dua instrumen utama, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter, yang dikelola oleh bank sentral, berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, suku bunga acuan, dan cadangan wajib, bank sentral dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan output perekonomian. Di sisi lain, kebijakan fiskal, yang dikelola oleh pemerintah, berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk merangsang atau menghambat pertumbuhan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan sosial seperti mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat kompleks. Keduanya saling mempengaruhi dan dapat bekerja secara sinergis atau kontrariktif. Kebijakan moneter yang ketat, misalnya, dapat menekan inflasi namun juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang ekspansif dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi namun juga dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan moneter dan fiskal yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme transmisi kebijakan, serta koordinasi yang baik antara otoritas moneter dan fiskal.

Penelitian mengenai peran kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian seringkali beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur ekonomi, kondisi eksternal, dan ekspektasi pelaku ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur yang ada

¹ *Stabilitas Ekonomi, "A Peran Bank Sentral Dan Kebijakan," 2024, 1–7.*

dengan menganalisis peran kebijakan moneter dan fiskal dalam konteks [konteks spesifik penelitian Anda, misalnya: ekonomi Indonesia, periode pasca krisis, atau sektor tertentu].²

Landasan Teori

A. Definisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga, dengan tujuan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini berfungsi sebagai alat kontrol ekonomi, yang memungkinkan bank sentral untuk memengaruhi tingkat inflasi, nilai tukar, dan lapangan kerja secara langsung atau tidak langsung. Dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi, bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan uang, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, bank sentral dapat memengaruhi konsumsi dan investasi, yang merupakan komponen penting dalam permintaan agregat. Apabila inflasi tinggi, bank sentral cenderung mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menurunkan tekanan harga. Sebaliknya, dalam situasi resesi atau pengangguran tinggi, bank sentral mungkin akan meningkatkan jumlah uang beredar untuk merangsang aktivitas ekonomi.³

Ada beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonominya. Instrumen-instrumen ini meliputi suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan kas minimum:

1. **Suku Bunga (Interest Rate):** Pengaturan suku bunga adalah instrumen utama dalam kebijakan moneter. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat mengurangi konsumsi dan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Hal ini biasanya dilakukan untuk menekan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga akan mempermudah akses kredit dan mendorong konsumsi serta investasi, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.
2. **Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operations):** Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat berharga oleh bank sentral di pasar terbuka. Ketika bank sentral

² Katolik Parahyangan and Chandra Utama, "Raih Doktor Usai Kaji Interaksi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Indonesia," 2021, 1–5.

³ Ahmad Safwan, "Studi Kasus Bank Sentral Indonesia," 2023, 1–11.

menjual surat berharga, jumlah uang beredar di masyarakat berkurang, yang membantu menekan inflasi. Sebaliknya, ketika bank sentral membeli surat berharga, jumlah uang beredar bertambah, yang dapat merangsang ekonomi dengan meningkatkan likuiditas di pasar keuangan.

3. **Cadangan Kas Minimum (Reserve Requirement):** Cadangan kas minimum adalah persentase dana yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan di bank sentral. Dengan meningkatkan cadangan kas minimum, bank sentral mengurangi kemampuan bank komersial untuk memberikan pinjaman, sehingga mengurangi jumlah uang beredar dan menekan inflasi. Sebaliknya, penurunan cadangan kas minimum memungkinkan bank untuk memberikan lebih banyak pinjaman, yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar dan merangsang pertumbuhan ekonomi.⁴

B. Definisi Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah melalui pengaturan anggaran negara, yang mencakup pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak, serta transfer dan subsidi. Kebijakan fiskal berfungsi sebagai alat kontrol ekonomi untuk mencapai tujuan makroekonomi, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengendalikan inflasi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sebagai alat kontrol ekonomi, kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah untuk memengaruhi permintaan agregat melalui perubahan dalam pengeluaran dan penerimaan negara. Ketika ekonomi mengalami resesi atau peningkatan pengangguran, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang permintaan agregat. Sebaliknya, jika terjadi inflasi yang tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk menekan permintaan, sehingga menurunkan tekanan inflasi. Dengan demikian, kebijakan fiskal menjadi sarana penting bagi pemerintah dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Ada beberapa instrumen kebijakan fiskal utama yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian, yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, dan transfer atau subsidi:

⁴ Gilang P, "Instrumen Kebijakan Moneter : Pengertian, Jenis, Tujuan, Dan Contohnya," *Gramedia Blog*, 2023, 1, <https://www.gramedia.com/literasi/instrumen-kebijakan-moneter/>.

1. **Pajak (Taxes):** Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah dan instrumen yang sangat efektif untuk mengendalikan perekonomian. Peningkatan pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menekan permintaan agregat, yang berguna untuk mengendalikan inflasi. Sebaliknya, penurunan pajak dapat meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran.⁵
2. **Pengeluaran Pemerintah (Government Spending):** Pengeluaran pemerintah mencakup berbagai belanja, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, efeknya akan memperbesar permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang membantu menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, pengurangan pengeluaran pemerintah dapat menekan permintaan agregat, yang sering digunakan untuk menurunkan inflasi.⁶
3. **Transfer dan Subsidi (Transfers and Subsidies):** Transfer adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa imbalan langsung, seperti bantuan sosial, pensiun, dan program kesejahteraan lainnya. Subsidi adalah bantuan langsung kepada sektor-sektor tertentu, seperti pangan atau energi, untuk mengurangi harga produk tertentu di pasar. Transfer dan subsidi berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung daya beli masyarakat, terutama bagi golongan berpenghasilan rendah, serta menjaga kestabilan harga barang-barang kebutuhan pokok. Dalam situasi resesi, peningkatan subsidi dan transfer dapat membantu menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan konsumsi, sementara pengurangan subsidi dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan menurunkan permintaan pada sektor tertentu.⁷

C. Hubungan Antara Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua instrumen utama yang digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Meskipun keduanya memiliki peran dan mekanisme yang berbeda, keduanya saling berhubungan dan mempengaruhi hasil ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank sentral lebih berfokus

⁵ *Sumber Pendapatan and Negara Berasal*, "82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal Dari Pajak," 2024, 4–6.

⁶ Merri Anitasari and Ahmad Soleh, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2015): 117–27, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.139>.

⁷ *Focus On*, "What's New?," no. 46 (2001): 1–20.

pada pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga, sementara kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah berfokus pada pengaturan anggaran, termasuk penerimaan pajak dan pengeluaran negara. Ketika kebijakan moneter dan fiskal diselaraskan dengan baik, keduanya dapat saling melengkapi untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.⁸

Interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal seringkali terlihat dalam upaya mengendalikan inflasi dan pengangguran. Misalnya, jika pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran publik untuk menciptakan lapangan kerja, bank sentral mungkin perlu menyesuaikan kebijakan moneter agar tidak terjadi tekanan inflasi. Dalam situasi ini, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, meskipun langkah tersebut mungkin menurunkan dampak positif dari kebijakan fiskal terhadap penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah dan bank sentral sangat penting agar tujuan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai tanpa saling menghambat.⁹

Dalam situasi ekonomi tertentu, kebijakan moneter dan fiskal bahkan dapat bekerja secara paralel untuk mencapai tujuan yang sama. Misalnya, dalam kondisi resesi atau ketika tingkat pengangguran tinggi, pemerintah mungkin akan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat. Pada saat yang sama, bank sentral dapat menurunkan suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka untuk menambah jumlah uang beredar. Kombinasi kebijakan ini dapat membantu mendorong konsumsi dan investasi, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.¹⁰

Namun, terdapat tantangan dalam menyelaraskan kebijakan moneter dan fiskal karena keduanya sering memiliki prioritas yang berbeda. Kebijakan fiskal cenderung bersifat politis dan fokus pada pertumbuhan jangka pendek serta kesejahteraan masyarakat, sedangkan kebijakan moneter lebih menitikberatkan pada stabilitas harga dalam jangka panjang. Ketidaksesuaian antara kedua kebijakan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Misalnya, jika kebijakan fiskal terlalu ekspansif dalam situasi ekonomi yang sudah penuh tenaga kerja, kebijakan tersebut dapat memicu inflasi tinggi

⁸ Bank Indonesia, "Moneter, Tujuan Kebijakan," *Bi.Go.Id*, 2020, 2, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>.

⁹ *Interaksi Kebijakan, Fiskal Dan, and Kebijakan Moneter*, "INDONESIA," 2021, 11–13.

¹⁰ *Jadi Nasabah and Tentang Kami*, "Kebijakan Fiskal : Pengertian , Jenis , Instrumen , & Contohnya Pengertian Fiskal," 2023, 1–8.

yang sulit dikendalikan oleh kebijakan moneter. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara pemerintah dan bank sentral dalam mengelola kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (literature review) untuk mengkaji dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, serta interaksi antara kedua kebijakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, termasuk artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan moneter dan fiskal saling mempengaruhi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai konteks.¹²

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Khusni Aristina et al. (2019) menggunakan model Vector Error Correction Model (VECM) untuk menganalisis data dari tahun 2005 hingga 2018 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga dan penerimaan pajak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara jumlah uang beredar dan pengeluaran pemerintah berkontribusi positif. Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Suku Bunga dalam Menekan Inflasi

Salah satu instrumen utama kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi adalah pengaturan suku bunga. Suku bunga memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan jumlah uang beredar di dalam perekonomian. Bank sentral, seperti Bank Indonesia, dapat menaikkan suku bunga untuk menekan laju inflasi yang tinggi. Melalui

¹¹ Parahyangan and Utama, "Raih Doktor Usai Kaji Interaksi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Indonesia."

¹² Ariadne Mael Novariani Putri and Sri Yani Kusumastuti, "Fiscal and Monetary Policy Interaction Post Indonesian Institutional Transformation: Vector Autoregression Approach," *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2024): 17–33, <https://doi.org/10.31685/kh78mn12>.

kenaikan suku bunga, bank sentral berharap dapat mengurangi tekanan permintaan dalam perekonomian yang seringkali menjadi penyebab utama inflasi.¹³

Ketika suku bunga dinaikkan, biaya pinjaman bagi masyarakat dan pelaku bisnis juga meningkat. Hal ini menyebabkan penurunan dalam aktivitas pinjaman, baik untuk konsumsi maupun investasi, karena biaya kredit yang lebih tinggi. Sebagai hasilnya, pengeluaran konsumen dan investasi perusahaan cenderung menurun. Penurunan konsumsi dan investasi ini mengurangi tekanan permintaan agregat dalam perekonomian, yang pada gilirannya membantu menekan kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, kenaikan suku bunga membuat produk-produk simpanan di bank lebih menarik bagi masyarakat karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini mendorong masyarakat untuk menyimpan lebih banyak uang di bank daripada membelanjakannya, yang juga berkontribusi pada pengurangan jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan berkurangnya uang beredar, tekanan permintaan pada barang dan jasa menurun, sehingga inflasi dapat dikendalikan.¹⁴

Pada sektor investasi, kenaikan suku bunga cenderung menurunkan minat perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi baru karena biaya modal meningkat. Misalnya, ketika perusahaan harus membayar bunga pinjaman yang lebih tinggi, mereka akan lebih selektif

¹³ Adiwirawan, "BI Menaikan Suku Bunga: Bagaimana Dampaknya Pada Perekonomian Masyarakat," *Undiknas University*, 2022, 1–4.

¹⁴ Moch Makhruj Afif, Nurwinsyah Rohmanigtiyas, and Umu Afiyah, "Pengaruh Produk Pembiayaan Kafalah Haji Terhadap Kepuasan Anggota Di Koperasi Syari 'Ah BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Sroyo " *Abstrak Kata Kunci : Kafalah Haji , Kepuasan Anggota , Kopsyah . Abstract Pendahuluan Haji Termasuk Rukun Islam Yang Ke Lima . Haji Dilaksanakan Bagi Orang Yang Mampu , Artinya Mampu Secara Ilmu , Fisik , Dan Material . Haji Adalah Suatu Ibadah Yang Dikerjakan Setahun Sekali Pada Bulan Dzulhijjah Yang Bertempat Di Negara Arab . Ibadah Haji Dikerjakan Oleh Umat Islam Seluruh Dunia Dengan Syarat-Syarat Tertentu . Melaksanakan Ibadah Haji Adalah Suatu Keinginan , Harapan , Dan Cita-Cita Seorang Muslim . Akan Tetapi Dengan Adanya Suatu Kendala , Masyarakat Muslim Masih Banyak Yang Belum Melaksanakan Ibadah Tersebut . Antara Lain Dari Kendala Tersebut Ialah Masalah Biaya Pendaftaran Yang Setiap Tahunnya Naik , Serta Kuota Yang Sangat Terbatas . Untuk Mengatasi Kendala Tersebut , Dapat Dilakukan Dengan Berusaha Semaksimal Mungkin Memastikan Keberangkatan Ibadah Haji Dengan Cara Mendaftar Dan Mendapatkan Nomor Porsi Haji . Calon Jamaah Haji Harus Membayar Rp . 25 . 000 . 000 , - Dan Sudah Bisa Dipastikan Tahun Keberangkatan . Ketentuan Ini Berlaku Setelah Fatwa Dikeuarkan Oleh Dewan Syari ' Ah Nasional No . 29 / DSN-MUI / VI / 2002 Tentang Pembiayaan Pengurus Haji Lembaga Keuangan Syari ' Ah . Untuk Mengatasi Masalah Masyarakat Yang Berkeinginan Berangkat Ibadah Haji Tetapi Terkendala Oleh Biaya Yang Lumayan Besar Ini , Peranan Lembaga Keuangan Syari ' Ah Dibutuhkan . Respon Sangat Positif Dari Masyarakat Adanya Dana Pembiayaan Haji Bisa Menjembatani Masalah Ini . Di Indonesia Banyak Lembaga Keuangan Syari ' Ah Yang Bersaing Dan Berlomba-Lomba Membuat Produk Dan Memberikan Layanan Kepada Masyarakat . Antara Lain Produk Yang Dibuat Adalah Produk Pembiayaan , Penghimpun Dana Dan Produk Jasa . Menurut PP No . 9 Tahun 1995 , Tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi , Pembiayaan Adalah : ' Penyediaan Uang Atau Tagihan Yang Dapat Dipersamakan Itu , Berdasarkan Tujuan Atau Kesepakatan Pinjam-Meminjam Antara Koperasi Dengan Pihak Lain Yang Mewajibkan Pihak Peminjam Untuk Melunasi Utangnya Setelah Jangka Waktu Tertentu Dengan Disertai Pembayaran Sejumlah Imbalan ' . I Pembiayaan Haji Adalah Salah Satu Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syari ' Ah Yang Dapat Membantu Para Calon Jamaah Untuk Segera Mendapatkan Nomor Porsi Haji . Dasar Yang Melandasinya Adalah Fatwa Dewan Syari ' Ah Nasional No . 29 / DSN-MUI / VI / 2002 Sebagai Berikut : ..., " 2024, 116–33.*

dalam melakukan investasi yang tidak mendesak. Dengan demikian, aktivitas ekonomi secara keseluruhan melambat, dan tekanan inflasi akibat permintaan yang tinggi dapat dikurangi.¹⁵

Namun, dampak dari kenaikan suku bunga dalam menekan inflasi biasanya membutuhkan waktu untuk dirasakan sepenuhnya dalam perekonomian, karena ada lag antara kebijakan moneter dan perubahan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan suku bunga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terlalu memperlambat perekonomian atau meningkatkan risiko resesi. Dalam praktiknya, bank sentral perlu menyeimbangkan kebijakan suku bunga agar efektif dalam menekan inflasi tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan.

B. Pengaruh Operasi Pasar Terbuka dalam Mengendalikan Inflasi

Operasi pasar terbuka (OPT) adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Melalui OPT, bank sentral melakukan aktivitas jual atau beli surat berharga pemerintah, seperti obligasi, di pasar terbuka. Tindakan ini bertujuan untuk menambah atau mengurangi likuiditas di pasar, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat inflasi.¹⁶

Ketika inflasi tinggi, bank sentral melakukan penjualan obligasi ke lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat. Ketika bank sentral menjual obligasi, pembeli menggunakan dana mereka untuk membeli obligasi tersebut, sehingga uang berpindah dari sektor keuangan ke bank sentral. Akibatnya, jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Penurunan jumlah uang beredar ini mengurangi daya beli masyarakat dan menekan permintaan agregat terhadap barang dan jasa, yang pada akhirnya membantu menurunkan laju inflasi.

Selain itu, ketika bank sentral menjual obligasi, harga obligasi cenderung turun, yang menyebabkan imbal hasil (yield) obligasi meningkat. Kenaikan imbal hasil ini membuat investasi dalam obligasi menjadi lebih menarik bagi para investor dibandingkan menginvestasikan uangnya dalam sektor konsumsi atau bisnis yang lebih berisiko. Dengan demikian, dana lebih banyak dialihkan ke instrumen investasi seperti obligasi daripada sektor konsumsi atau investasi langsung di sektor riil. Hal ini menurunkan aktivitas konsumsi dan

¹⁵ *Pentingnya Kestabilan Harga, Sasaran Inflasi, and Inflasi Inti*, "Disagregas i Inflasi Definisi Inflasi Disagregas i Inflasi Penyebab Inflasi Pentingnya Kestabilan Harga Sasaran Inflasi," n.d., 1–4.

¹⁶ *Iswandir*, "Monetary Policy in Order Stabilize Macroeconomics," *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 1 (2020): 27–35.

investasi langsung, sehingga membantu menekan permintaan dalam perekonomian dan menurunkan tekanan inflasi.¹⁷

Sebaliknya, ketika inflasi rendah atau terjadi risiko deflasi, bank sentral dapat membeli kembali obligasi dari masyarakat. Dengan melakukan pembelian obligasi, bank sentral melepaskan uangnya ke pasar, menambah likuiditas, dan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar ini mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat. Peningkatan permintaan ini dapat membantu mendorong harga ke tingkat yang lebih sehat jika ekonomi sedang mengalami tekanan deflasi.

OPT sebagai instrumen pengendalian inflasi biasanya bekerja dengan waktu tunda (lag), karena perubahan dalam jumlah uang beredar membutuhkan waktu untuk memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Bank sentral harus menyeimbangkan penggunaan OPT secara hati-hati agar tidak terlalu banyak mengurangi likuiditas hingga memperlambat ekonomi secara drastis, tetapi cukup untuk menekan inflasi ke tingkat yang stabil. Dengan cara ini, operasi pasar terbuka menjadi salah satu alat penting bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kondisi ekonomi yang kondusif.¹⁸

C. Kebijakan Kuantitatif dalam Pengembalian

Kebijakan kuantitatif adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Berikut adalah penjelasan tentang kebijakan kuantitatif dan dampaknya dalam pengendalian inflasi:

1. Pengertian Kebijakan Kuantitatif

Kebijakan kuantitatif mengacu pada tindakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Salah satu metode utama kebijakan ini adalah *quantitative easing (QE)*, di mana bank sentral membeli surat utang atau aset lainnya untuk meningkatkan cadangan bank komersial dan mendorong likuiditas dalam perekonomian. QE umumnya diterapkan saat suku bunga sudah sangat rendah (mendekati nol), sehingga instrumen konvensional seperti penyesuaian suku bunga tidak lagi efektif.¹⁹

2. Tujuan Kebijakan Kuantitatif

Tujuan utama dari kebijakan kuantitatif adalah:

¹⁷ Munir Hamid et al., "Revolusi Ekonomi Umat Dengan Fintech Syariah : Analisis Dan Peluang," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 59–80.

¹⁸ Ascarya, *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter, Seri Kebanksentralan*, 2002.

¹⁹ Suaedi Fachruddin and Universitas Cokroaminoto Palopo, "Untuk Analisis Kebijakan," no. January 2013 (2016).

- Mendorong likuiditas dan mencegah deflasi: Dengan menambah cadangan bank dan meningkatkan jumlah uang beredar, kebijakan ini membantu mencegah deflasi atau perlambatan ekonomi yang terlalu tajam.
- Menggerakkan sektor riil: Peningkatan likuiditas memungkinkan suku bunga lebih rendah, yang mendorong pinjaman, investasi, dan konsumsi.
- Mendukung inflasi yang stabil: Bank sentral sering menargetkan inflasi pada tingkat tertentu (misalnya 2%) sebagai tanda kesehatan ekonomi yang optimal.²⁰

3. Dampak Kebijakan Kuantitatif Terhadap Pengendalian Inflasi

Kebijakan kuantitatif memiliki beberapa dampak pada inflasi yang dapat menguntungkan maupun merugikan tergantung pada kondisi perekonomian, antara lain:

- Meningkatkan Inflasi secara Bertahap: Dalam situasi ekonomi yang sedang lesu atau mengalami deflasi, kebijakan kuantitatif dapat membantu meningkatkan inflasi. Dengan memperbanyak uang beredar, permintaan agregat cenderung meningkat, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara moderat.
- Efek Terhadap Nilai Tukar: Kebijakan QE dapat menekan nilai mata uang domestik karena peningkatan suplai uang, yang membuat ekspor lebih kompetitif. Meningkatnya permintaan produk domestik di pasar internasional bisa meningkatkan pendapatan dan inflasi dalam negeri.
- Dampak Terhadap Inflasi Jangka Panjang: Jika kebijakan kuantitatif dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan dengan volume besar, risiko inflasi yang berlebihan atau *overheating* meningkat. Likuiditas yang tinggi tanpa diimbangi dengan pertumbuhan produksi dapat mendorong harga naik terlalu cepat.
- Mempengaruhi Ekspektasi Inflasi: Kebijakan ini juga memengaruhi ekspektasi pelaku pasar terhadap inflasi di masa depan. Ekspektasi inflasi yang tinggi bisa mempercepat kenaikan harga barang dan jasa

²⁰ Fachruddin and Palopo.

karena perusahaan dan konsumen bersiap menghadapi biaya yang lebih tinggi di masa depan.²¹

4. Risiko dan Keterbatasan Kebijakan Kuantitatif

Walaupun kebijakan kuantitatif bisa menjadi alat penting untuk mendorong inflasi di tengah resesi, kebijakan ini juga memiliki keterbatasan dan risiko, antara lain:

- Risiko Kelebihan Likuiditas: Kelebihan likuiditas bisa menciptakan bubble atau gelembung harga di pasar aset seperti saham dan properti, yang justru berbahaya bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.
- Efek yang Tidak Merata: Kebijakan kuantitatif cenderung lebih bermanfaat bagi pasar keuangan daripada sektor riil, sehingga inflasi mungkin tidak berdampak merata pada perekonomian.
- Ketergantungan pada Kebijakan: Jika perekonomian terlalu bergantung pada kebijakan ini, maka dalam jangka panjang, perekonomian bisa rentan terhadap fluktuasi besar saat kebijakan ini dihentikan

D. Peningkatan Pengeluaran Pemerintah

Peningkatan pengeluaran pemerintah, terutama dalam bentuk belanja negara, merupakan strategi fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan membuka lapangan kerja baru.²² Berikut ini pembahasan tentang bagaimana peningkatan belanja negara dapat menciptakan lapangan kerja baru:

1. Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah atau belanja negara adalah alokasi dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan, menyediakan layanan publik, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Belanja ini mencakup pengeluaran untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, subsidi, bantuan sosial, dan pengeluaran rutin lainnya.

2. Pengaruh Langsung Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja

²¹ I Yoga and I Pratiwi, "Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19," *JIS Siwirabuda* 01, no. 02 (2023): 151–58, www.bi.go.id.

²² Yoopi Abimanyu, *Badan Kebijakan Fiskal, and Kementerian Keuangan, "PENGELUARAN PEMERINTAH DAN IMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 1 Government Expenditure And Its Impact On The Economic Growth Of Indonesia," Fiskal Kemenkeu, 2015, 1–25.*

Ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran, dampaknya terasa secara langsung dalam bentuk lapangan kerja yang tercipta dari proyek-proyek yang dibiayai pemerintah. Beberapa contohnya adalah:

- **Proyek Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana publik lainnya memerlukan banyak tenaga kerja, mulai dari pekerja konstruksi, insinyur, hingga tenaga ahli. Ini membuka lapangan kerja secara langsung di sektor konstruksi dan sektor-sektor pendukungnya.
- **Sektor Layanan Publik:** Pengeluaran untuk layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan meningkatkan kebutuhan tenaga kesehatan (dokter, perawat) dan tenaga pengajar, yang otomatis menciptakan lapangan kerja baru di sektor-sektor tersebut.²³

3. Dampak Tidak Langsung Melalui Efek Multiplikasi

Pengeluaran pemerintah juga memiliki efek multiplikasi (*multiplier effect*) yang dapat menciptakan lapangan kerja tidak langsung. Efek ini terjadi karena proyek-proyek pemerintah mendorong pengeluaran di sektor lain, seperti:

- **Permintaan Barang dan Jasa dari Sektor Swasta:** Ketika pemerintah membangun proyek infrastruktur, bahan bangunan, peralatan, dan layanan terkait (transportasi, jasa pengangkutan) akan dibeli dari sektor swasta. Ini meningkatkan permintaan di sektor-sektor tersebut, yang akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja.
- **Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga:** Ketika lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan, pendapatan masyarakat meningkat. Hal ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan permintaan produk-produk konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja di sektor ritel, produksi barang konsumsi, dan layanan lainnya.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pengeluaran pemerintah yang diarahkan pada proyek-proyek produktif seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan akan memperkuat kapasitas ekonomi jangka panjang.

²³ *Abimanyu, Fiskal, and Keuangan.*

Investasi ini menciptakan efek berantai yang mendukung lapangan kerja jangka panjang, karena:

- **Meningkatkan Daya Saing Ekonomi:** Infrastruktur yang baik, misalnya, mempermudah pergerakan barang dan jasa, sehingga menarik lebih banyak investor, baik domestik maupun asing. Investasi baru ini menciptakan lapangan kerja lebih lanjut.
- **Mengembangkan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja:** Investasi di sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga memperluas kesempatan kerja dengan kualifikasi yang lebih baik dan produktivitas yang lebih tinggi.

5. Dampak Pengeluaran Pemerintah di Sektor UMKM

Pemerintah juga sering meningkatkan belanja melalui program-program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan meningkatkan dukungan terhadap UMKM, lapangan kerja baru dapat tercipta di seluruh daerah, termasuk daerah yang terpencil, karena:

- **Program Subsidi dan Bantuan:** Pemerintah memberikan bantuan modal atau subsidi, yang memungkinkan UMKM untuk berkembang. UMKM yang berkembang akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, baik untuk produksi, pemasaran, maupun distribusi.
- **Program Pengadaan Barang dan Jasa dari UMKM:** Beberapa pemerintah daerah dan pusat menerapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa dari UMKM, yang menciptakan permintaan tambahan dan membuka peluang kerja di sektor ini.

6. Tantangan dan Risiko

Meskipun peningkatan pengeluaran pemerintah dapat membuka lapangan kerja, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- **Efisiensi Penggunaan Anggaran:** Dana harus dialokasikan secara efektif untuk menghindari pemborosan atau korupsi yang justru menghambat penciptaan lapangan kerja.
- **Risiko Inflasi:** Belanja negara yang berlebihan tanpa peningkatan produktivitas dapat menyebabkan inflasi, yang mengurangi daya beli

dan berpotensi mengurangi lapangan kerja di sektor-sektor yang tertekan oleh kenaikan harga.

- Defisit Anggaran: Pengeluaran pemerintah yang besar perlu diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Defisit yang terlalu besar dapat membebani ekonomi, terutama jika dibiayai oleh utang yang harus dibayar dalam jangka panjang.

E. Penurunan Pajak untuk Mendorong Investasi

Penurunan pajak adalah kebijakan fiskal yang sering digunakan pemerintah untuk mendorong investasi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja. Berikut pembahasan mengenai bagaimana penurunan pajak dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat pengangguran.²⁴

1. Pengertian Penurunan Pajak dan Tujuannya

Penurunan pajak adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk:

- Meningkatkan Daya Beli dan Konsumsi: Dengan pajak yang lebih rendah, pendapatan bersih rumah tangga meningkat, sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga dapat meningkat.
- Mendorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Pajak yang lebih rendah bagi perusahaan meningkatkan laba bersih, yang memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi lebih besar dalam pengembangan usaha, inovasi, dan ekspansi.
- Menciptakan Lapangan Kerja: Dengan meningkatnya investasi, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat, sehingga lapangan kerja baru terbuka, yang pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran.

2. Dampak Penurunan Pajak Terhadap Penciptaan Lapangan Kerja

²⁴ Adi Lesmana and Enggar Paskhalis Lahu, "Analisis Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan," *Tri Panji Liberal Arts Journal* 2, no. 1 (2023): 30–47.

Penurunan pajak memiliki beberapa dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja melalui beberapa mekanisme, di antaranya:

- Meningkatkan Investasi di Sektor Swasta: Penurunan pajak korporasi membuat perusahaan memiliki lebih banyak laba bersih yang bisa diinvestasikan kembali dalam bisnis. Ini bisa berupa investasi dalam bentuk pembelian alat produksi, perluasan pabrik, atau bahkan mendirikan cabang baru, yang semuanya membutuhkan tenaga kerja tambahan.
- Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM): Penurunan pajak untuk UMKM sangat bermanfaat karena membantu meningkatkan profitabilitas usaha kecil. UMKM yang tumbuh dapat memperluas operasi dan merekrut lebih banyak karyawan, yang penting dalam mengurangi pengangguran di tingkat lokal.
- Meningkatkan Daya Saing: Pajak yang rendah menjadikan suatu negara lebih menarik bagi investor asing, terutama dalam situasi di mana negara-negara bersaing untuk menarik investasi langsung asing (Foreign Direct Investment atau FDI). Masuknya FDI dapat meningkatkan lapangan kerja melalui pendirian pabrik baru, kantor perwakilan, dan proyek investasi lainnya.²⁵

3. Pengaruh Penurunan Pajak Terhadap Pengurangan Pengangguran

Penurunan pajak dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

- Peningkatan Permintaan Barang dan Jasa: Dengan meningkatnya pendapatan bersih konsumen akibat penurunan pajak, daya beli rumah tangga akan naik. Konsumsi yang meningkat ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, yang berarti membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.
- Menambah Angka Pekerjaan di Berbagai Sektor: Ketika perusahaan berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, ini juga menciptakan efek berantai, karena pekerja yang baru dipekerjakan

²⁵ Olivia Jesica Kristie and Adang Hendrawan, "PENURUNAN TARIF PPh BADAN DITINJAU DARI PENANAMAN MODAL," *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 5, no. 2 (2021): 144–53, <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i2.473>.

akan memiliki daya beli lebih tinggi. Efek berantai ini dapat menguntungkan sektor lain seperti ritel, layanan, dan transportasi.

- Mengurangi Pengangguran Struktural: Penurunan pajak bisa diarahkan untuk sektor-sektor tertentu (misalnya teknologi, manufaktur, atau pariwisata) yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sektor-sektor ini, jika berkembang, akan menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja yang belum terpakai atau pengangguran struktural.²⁶

4. Efek Jangka Panjang Penurunan Pajak Terhadap Investasi dan Lapangan Kerja

Penurunan pajak dapat memiliki dampak positif jangka panjang yang berkelanjutan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran jika diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya, seperti:

- Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan: Dengan pajak yang lebih rendah, perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya untuk melatih tenaga kerja baru dan meningkatkan keterampilan pekerja. Ini berpotensi mengurangi pengangguran jangka panjang yang disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- Memacu Inovasi dan Pengembangan Teknologi: Penurunan pajak di sektor tertentu, seperti teknologi, dapat meningkatkan daya saing industri dan menciptakan jenis pekerjaan baru yang berbasis teknologi. Ini bisa mengurangi pengangguran di kalangan lulusan baru dan meningkatkan peluang bagi tenaga kerja terampil.²⁷

5. Potensi Tantangan dan Risiko Penurunan Pajak

Meskipun penurunan pajak dapat memberikan banyak manfaat dalam mendorong investasi dan lapangan kerja, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:

²⁶ Triyas Ayu Hadi Setiowati *jdep* and Ris Yuwono Yudo Nugroho *jdep*, "Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Pengangguran Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 4, no. 1 (2024): 55–63, <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.205>.

²⁷ Merry Inriama and Milla Sepliana Setyowati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment Dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 5, no. 4 (2020): 325–42, <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.240>.

- Keseimbangan dengan Anggaran Negara: Penurunan pajak dapat mengurangi pendapatan pemerintah, yang bisa berpotensi menurunkan anggaran untuk layanan publik jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan lain atau penghematan. Hal ini berisiko mengganggu stabilitas ekonomi jangka panjang.
- Kesenjangan Ekonomi: Penurunan pajak untuk perusahaan besar berpotensi lebih menguntungkan perusahaan yang sudah mapan, sementara perusahaan kecil mungkin tidak merasakan manfaat yang signifikan. Untuk mencegah hal ini, penurunan pajak perlu disertai dengan insentif khusus bagi UMKM dan sektor yang strategis.
- Inflasi dan Ketidakstabilan Ekonomi: Jika permintaan meningkat terlalu cepat akibat daya beli yang tinggi, ekonomi mungkin mengalami inflasi yang berlebihan. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu mengontrol laju pertumbuhan permintaan agar tidak menyebabkan tekanan harga yang signifikan.²⁸

Kesimpulan

Stabilitas ekonomi, yang tercermin dalam tingkat inflasi yang terkendali dan pengurangan kemiskinan, merupakan tujuan utama bagi setiap negara. Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua instrumen utama yang digunakan untuk mencapainya. Kebijakan moneter, yang dikelola oleh bank sentral, berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal, yang ditangani oleh pemerintah, berfokus pada pengelolaan anggaran negara melalui pajak dan pengeluaran. Kedua kebijakan ini saling berinteraksi dan dapat bekerja secara sinergis atau bahkan saling bertentangan, tergantung pada kondisi ekonomi.

Kebijakan moneter yang ketat dapat mengendalikan inflasi, namun jika diterapkan secara berlebihan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang ekspansif dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak terkendali, dapat memicu inflasi. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara

²⁸ Budiyanti Eka, "Penurunan Target Rasio Perpajakan Dalam Rapbn 2025," Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024.

kebijakan moneter dan fiskal sangat penting untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui analisis kebijakan moneter dan fiskal, ditemukan bahwa instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan kuantitatif berperan penting dalam mengendalikan inflasi, sementara peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, tantangan utama adalah bagaimana menyelaraskan kedua kebijakan ini agar tidak saling menghambat dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang dapat merugikan perekonomian jangka panjang.

Untuk mencapai stabilitas ekonomi yang optimal, kebijakan moneter dan fiskal harus diterapkan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi yang ada, serta dilakukan koordinasi yang erat antara pemerintah dan bank sentral.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk mencapai stabilitas ekonomi yang optimal:

1. Koordinasi yang Kuat antara Bank Sentral dan Pemerintah: Diperlukan komunikasi yang efektif dan rutin antara pembuat kebijakan moneter dan fiskal untuk memastikan kedua kebijakan berjalan sejalan. Pemerintah dan bank sentral perlu berbagi data serta proyeksi ekonomi untuk mengambil kebijakan yang saling mendukung.
2. Pengaturan Kebijakan Moneter yang Fleksibel: Bank sentral harus menerapkan kebijakan moneter yang responsif dan fleksibel sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi, terutama terkait pengendalian inflasi dan pengaturan suku bunga. Kebijakan ini perlu dikaji secara berkala agar tidak terlalu ketat, yang dapat menghambat pertumbuhan, ataupun terlalu longgar, yang dapat memicu inflasi.
3. Kebijakan Fiskal yang Berfokus pada Pertumbuhan Inklusif: Pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk program-program yang tidak hanya merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekan angka kemiskinan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pengeluaran ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja dan memperkuat daya beli masyarakat.
4. Penggunaan Instrumen Kebijakan secara Proporsional: Kebijakan fiskal yang ekspansif perlu diimbangi dengan kebijakan moneter yang tepat agar inflasi tidak meningkat pesat. Instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka dan suku bunga perlu diterapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai.

5. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala: Pemerintah dan bank sentral sebaiknya melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, kebijakan yang tidak efektif dapat segera disesuaikan untuk meminimalkan risiko ketidakseimbangan ekonomi.
6. Peningkatan Transparansi Kebijakan: Transparansi dalam penerapan kebijakan moneter dan fiskal akan meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat. Hal ini juga membantu meningkatkan stabilitas ekonomi jangka panjang karena para pelaku ekonomi dapat menyesuaikan strategi mereka dengan arah kebijakan yang jelas.

Daftar Pustaka

- Abimanyu, Yoopi, Badan Kebijakan Fiskal, and Kementerian Keuangan. "PENGELUARAN PEMERINTAH DAN IMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 1 Government Expenditure And Its Impact On The Economic Growth Of Indonesia." *Fiskal Kemenkeu*, 2015, 1–25.
- Adiwirawan. "BI Menaikan Suku Bunga: Bagaimana Dampaknya Pada Perekonomian Masyarakat." *Undiknas University*, 2022, 1–4.
- Afif, Moch Makhruj, Nurwinsyah Rohmanigtiyas, and Umu Afiyah. "Pengaruh Produk Pembiayaan Kafalah Haji Terhadap Kepuasan Anggota Di Koperasi Syari ' Ah BMT NU Ngasem Jawa Timur Cabang Sroyo " Abstrak Kata Kunci : Kafalah Haji , Kepuasan Anggota , Kopsyah . Abstract Pendahuluan Haji Termasuk Rukun Islam Yang Ke Lima . Haji Dilaksanakan Bagi Orang Yang Mampu , Artinya Mampu Secara Ilmu , Fisik , Dan Material . Haji Adalah Suatu Ibadah Yang Dikerjakan Setahun Sekali Pada Bulan Dzulhijjah Yang Bertempat Di Negara Arab . Ibadah Haji Dikerjakan Oleh Umat Islam Seluruh Dunia Dengan Syarat-Syarat Tertentu . Melaksanakan Ibadah Haji Adalah Suatu Keinginan , Harapan , Dan Cita-Cita Seorang Muslim . Akan Tetapi Dengan Adanya Suatu Kendala , Masyarakat Muslim Masih Banyak Yang Belum Melaksanakan Ibadah Tersebut . Antara Lain Dari Kendala Tersebut Ialah Masalah Biaya Pendaftaran Yang Setiap Tahunnya Naik , Serta Kuota Yang Sangat Terbatas . Untuk Mengatasi Kendala Tersebut , Dapat Dilakukan Dengan Berusaha Semaksimal Mungkin Memastikan Keberangkatan Ibadah Haji Dengan Cara Mendaftar Dan Mendapatkan Nomor Porsi Haji . Calon Jamaah Haji Harus Membayar Rp . 25 . 000 . 000 , - Dan Sudah Bisa Dipastikan Tahun Keberangkatan . Ketentuan Ini Berlaku Setelah Fatwa Dikeuarkan Oleh Dewan Syari ' Ah Nasional No . 29 / DSN-MUI / VI / 2002 Tentang Pembiayaan Pengurus Haji Lembaga Keuangan Syari ' Ah . Untuk Mengatasi Masalah Masyarakat Yang

Berkeinginan Berangkat Ibadah Haji Tetapi Terkendala Oleh Biaya Yang Lumayan Besar Ini , Peranan Lembaga Keuangan Syariah ' Ah Dibutuhkan . Respon Sangat Positif Dari Masyarakat Adanya Dana Pembiayaan Haji Bisa Menjembatani Masalah Ini . Di Indonesia Banyak Lembaga Keuangan Syariah ' Ah Yang Bersaing Dan Berlomba-Lomba Membuat Produk Dan Memberikan Layanan Kepada Masyarakat . Antara Lain Produk Yang Dibuat Adalah Produk Pembiayaan , Penghimpun Dana Dan Produk Jasa . Menurut PP No . 9 Tahun 1995 , Tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi , Pembiayaan Adalah : ‘ Penyediaan Uang Atau Tagihan Yang Dapat Dipersamakan Itu , Berdasarkan Tujuan Atau Kesepakatan Pinjam-Meminjam Antara Koperasi Dengan Pihak Lain Yang Mewajibkan Pihak Peminjam Untuk Melunasi Utangnya Setelah Jangka Waktu Tertentu Dengan Disertai Pembayaran Sejumlah Imbalan ’ . 1 Pembiayaan Haji Adalah Salah Satu Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah ' Ah Yang Dapat Membantu Para Calon Jamaah Untuk Segera Mendapatkan Nomor Porsi Haji . Dasar Yang Melandasinya Adalah Fatwa Dewan Syariah ' Ah Nasional No . 29 / DSN-MUI / VI / 2002 Sebagai Berikut :...,” 2024, 116–33.

- Anitasari, Merri, and Ahmad Soleh. “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2015): 117–27. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i2.139>.
- Ariadne Mael Novariani Putri, and Sri Yani Kusumastuti. “Fiscal and Monetary Policy Interaction Post Indonesian Institutional Transformation: Vector Autoregression Approach.” *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2024): 17–33. <https://doi.org/10.31685/kh78mn12>.
- Ascarya. *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter. Seri Kebanksentralan*, 2002.
- Eka, Budiyantri. “Penurunan Target Rasio Perpajakan Dalam Rapbn 2025.” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*, 2024.
- Ekonomi, Stabilitas. “A Peran Bank Sentral Dan Kebijakan,” 2024, 1–7.
- Fachruddin, Suaedi, and Universitas Cokroaminoto Palopo. “Untuk Analisis Kebijakan,” no. January 2013 (2016).
- Hamid, Munir, Nurwingsyah Rohmaningtyas, Universitas Islam, Darul Ulum, and Universitas Negeri Surabaya. “Revolusi Ekonomi Umat Dengan Fintech Syariah : Analisis Dan Peluang.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 59–80.
- Harga, Pentingnya Kestabilan, Sasaran Inflasi, and Inflasi Inti. “Disagregas i Inflasi Definisi Inflasi Disagregas i Inflasi Penyebab Inflasi Pentingnya Kestabilan Harga Sasaran Inflasi,” n.d., 1–4.

- Indonesia, Bank. “Moneter, Tujuan Kebijakan.” *Bi.Go.Id*, 2020, 2. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>.
- Inriama, Merry, and Milla Sepliana Setyowati. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Foreign Direct Investment Dan Tax Rate Terhadap Penerimaan PPh Badan Negara ASEAN.” *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 5, no. 4 (2020): 325–42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i4.240>.
- Iswandir. “Monetary Policy in Order Stabilize Macroeconomics.” *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 1 (2020): 27–35.
- jdep, Triyas Ayu Hadi Setiowati, and Ris Yuwono Yudo Nugroho jdep. “Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Pengangguran Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 4, no. 1 (2024): 55–63. <https://doi.org/10.33005/jdep.v4i1.205>.
- Kebijakan, Interaksi, Fiskal Dan, and Kebijakan Moneter. “INDONESIA,” 2021, 11–13.
- Kristie, Olivia Jesica, and Adang Hendrawan. “PENURUNAN TARIF PPh BADAN DITINJAU DARI PENANAMAN MODAL.” *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 5, no. 2 (2021): 144–53. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i2.473>.
- Lesmana, Adi, and Enggar Paskhalis Lahu. “Analisis Kebijakan Penurunan Tarif PPh Badan.” *Tri Panji Liberal Arts Journal* 2, no. 1 (2023): 30–47.
- Nasabah, Jadi, and Tentang Kami. “Kebijakan Fiskal : Pengertian , Jenis , Instrumen , & Contohnya Pengertian Fiskal,” 2023, 1–8.
- On, Focus. “W h a t ’ s N e W ?,” no. 46 (2001): 1–20.
- P, Gilang. “Instrumen Kebijakan Moneter : Pengertian, Jenis, Tujuan, Dan Contohnya.” *Gramedia Blog*, 2023, 1. <https://www.gramedia.com/literasi/instrumen-kebijakan-moneter/>.
- Parahyangan, Katolik, and Chandra Utama. “Raih Doktor Usai Kaji Interaksi Kebijakan Fiskal Dan Moneter Indonesia,” 2021, 1–5.
- Pendapatan, Sumber, and Negara Berasal. “82,4% Sumber Pendapatan Negara Berasal Dari Pajak,” 2024, 4–6.
- Safwan, Ahmad. “Studi Kasus Bank Sentral Indonesia,” 2023, 1–11.
- Yoga, I, and I Pratiwi. “Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19.” *JIS Siwirabuda* 01, no. 02 (2023): 151–58. www.bi.go.id.